

ABSTRAK

PERILAKU APARAT DESA: STUDI RELASI KUASA ALIRAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG

Oleh

FARIDA MIROJATUN KHASANAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, bentuk relasi kuasa yang terjalin, dan faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Sulusuban, dan Pejabat Keuangan dan Aset Desa Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Tengah. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban telah mengikuti seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, namun diperlukan evaluasi lebih lanjut pada tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan Pelaporan pertanggungjawaban. (2) Dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa menciptakan wacana yang berdasar pada pengetahuan dalam mengelola Dana Desa, kemudian dipercayai dan diterima oleh masyarakat hingga menciptakan hegemoni. (3) Kesadaran terhadap hegemoni menciptakan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam bentuk *hidden transcript* dan *publik transcrip* dan sebagai bukti bahwa sebenarnya masyarakat dan BPD memiliki kekuasaan untuk membela haknya, hal ini merepresantasikan pendapat Foucault bahwa kekuasaan bukan milik organisasi melainkan ada dimana-mana dan tersebar di masyarakat. (4) Faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur merupakan hasil diskursus yang diproduksi oleh Perangkat Desa, BPD, masyarakat, dan Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung Tengah.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemerintah Desa, Diskursus, Hegemoni, Resistensi

ABSTRACT

VILLAGE AUTHORITIES BEHAVIOR: A STUDY OF THE POWER RELATIONS OF VILLAGE FUND FLOWS FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN VILLAGE GOVERNMENT IN LAMPUNG

By

FARIDA MIROJATUN KHASANAH

This research aims to determine the management of Village Funds at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages, the forms of power relations that exist, and factors inhibiting the realization of Village Funds for infrastructure development in Sulusuban Village, Seputih Agung District, Central Lampung Regency. The research method used was qualitative by conducting in-depth interviews with Village Officials, the Village Consultative Body (BPD), the Sulusuban Village community, and the Village Finance and Assets Officer of the District Community and Village Empowerment Service. Central Lampung. Data collection uses observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this research show that: (1) Village Fund Management in Sulusuban Village has followed all stages of Village Fund management, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability, however further evaluation is needed at the planning, development implementation and accountability reporting stages. (2) In carrying out Village Fund management, the Village Government creates discourse that is based on knowledge in managing Village Funds, which is then trusted and accepted by the community, thereby creating hegemony. (3) Awareness of hegemony creates resistance carried out by the community and the BPD in the form of hidden transcripts and public transcripts and as proof that the community and the BPD actually have the power to defend their rights, this represents Foucault's opinion that power does not belong to the organization but is everywhere and spread in society. (4) Factors inhibiting the realization of Village Funds for infrastructure development are the result of discourse produced by Village Apparatus, BPD, the community, and District PMD Service Officials. Central Lampung.

Keywords: Village funds, Village Authorities, Diskursus, Hegemoni, resistence